



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Program Penyusunan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1104);

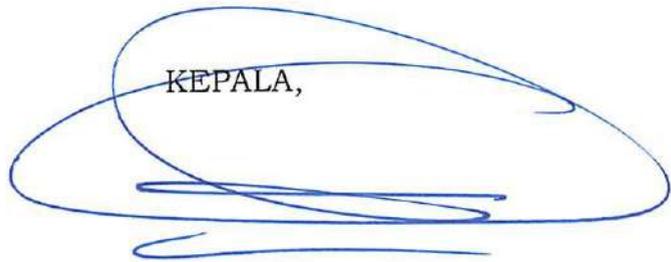
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021.
- PERTAMA** : Menetapkan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021.
- KEDUA** : Program Penyusunan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Sekretaris Utama melakukan evaluasi perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA per triwulan dan melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala.

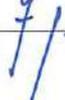
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Utama	
2.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN

IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
1.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Pedoman Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Lembaga Tinggi Pemerintah, Kementerian/	Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan	1. Belum terciptanya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan belum ada kejelasan kegiatan pelayanan internal dan	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Peraturan Presiden Nomor	Pedoman Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Lembaga Tinggi Pemerintah, Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial Politik dan	1. BPIP 2. Lembaga Tinggi Negara 3. Kementerian /Lembaga 4. Pemerintah Daerah 5. Organisasi Sosial Politik	Desember 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	Lembaga Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial Politik dan Masyarakat Lainnya		eksternal dalam penyusunan Nota Kesepahaman 2. Belum ada SOP dan transparansi penyelesaian penyusunan suatu kerja sama dengan berbagai pihak di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 3. Kurangnya kepastian pelayanan mulai dari proses awal, pejabat pelaksana,	18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Pembinaan Ideologi Pancasila 4. Peraturan Badan	Masyarakat Lainnya	6. Komponen Masyarakat Lainnya	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			persyaratan administrasi, sampai dengan hasil akhir yang dibakukan untuk masing-masing kegiatan dalam proses penyusunan Nota Kesepahaman	Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024			
2.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Aplikasi Data Base Kemitraan BPIP (Lembaga Tinggi Pemerintah, Kementerian/	Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada sistem yang terintegrasi melalui aplikasi untuk menyimpan database mitra kerja sama BPIP 2. Aplikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 	Aplikasi Data Base Kemitraan BPIP (Lembaga Tinggi Pemerintah, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPIP 2. Lembaga Tinggi Negara 3. Kementerian /Lembaga 4. Pemerintah Daerah 	Desember 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial Politik dan Masyarakat Lainnya)		penyimpanan database akan dapat memudahkan seluruh unit kerja BPIP dalam menjalin kerja sama dengan mitra kerja BPIP	2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Pembinaan	Politik dan Masyarakat Lainnya)	5. Organisasi Sosial Politik 6. Komponen Masyarakat Lainnya	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				Ideologi Pancasila 4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024			
3.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Monitoring dan Evaluasi Efektivitas	Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan	1. Unit kerja di BPIP kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan	Monitoring dan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Kerja Sama Antara BPIP dengan Mitra Kerja Sama BPIP	1. BPIP 2. Lembaga Tinggi Negara 3. Kementerian /Lembaga	Desember 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	Pelaksanaan Kerja Sama Antara BPIP dengan Mitra Kerja Sama BPIP		kegiatan oleh para pihak sebagai bentuk tindak lanjut atau Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani 2. Efektivitas Nota Kesepahaman tidak dapat diukur karena belum adanya indikator evektifitas Nota Kesepahaman 3. Efektivitas Nota Kesepahaman tidak dapat	Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan		4. Pemerintah Daerah 5. Organisasi Sosial Politik 6. Komponen Masyarakat Lainnya	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			<p>diukur tanpa melalui monitoring dan evaluasi secara berkala</p> <p>4. Hasil monev terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman tidak terdata dengan baik sehingga tidak dapat dijadikan bahan evaluasi oleh masing-masing pihak</p>	<p>Tata Kerja badan Pembinaan Ideologi Pancasila</p> <p>4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024</p>			
4.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Tata	Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan	1. Kedeputian Hukum, Advokasi dan Pengawasan	1. Pasal 3, Pasal 4 huruf i, Pasal 26, Pasal 27 huruf d,	Substansi yang diatur: 1. Tatacara	Seluruh pegawai BPIP dan <i>stakeholder</i>	Juni 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	Cara dan Kriteria Pelaksanaan Advokasi Ideologi Pancasila	Pengawasan Regulasi	Regulasi mempunyai tugas melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi; 2. Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila adalah advokasi positif dalam bentuk pemberian penghargaan dan advokasi Penanganan	huruf e, dan huruf f Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP	Pemberian Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila; 2. Tatacara Pelaksanaan Advokasi serta Penanganan Penyelesaian dan Penanggulangan Masalah dan Kendala dalam Pembinaan Ideologi Pancasila.	terkait	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			Penyelesaian dan Penanggulangan Masalah dan Kendala dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dalam bentuk penegahan dan pendampingan; 3. Saat ini belum ada standar/acuan baku tentang Tata Cara dan Kriteria Pelaksanaan Advokasi Ideologi Pancasila.				
5.	Rancangan Peraturan BPIP Tentang Materi	Deputi Pengkajian dan Materi	1. Dalam rangka menyatukan persepsi, pola dan	1. Undang-Undang Dasar NRI 1945 2. Undang-Undang	Substansi yang diatur: 1. Materi Pokok	ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Anggota	Agustus 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	Pokok Pembinaan Ideologi Pancasila		<p>bahan dasar penyusunan dan penyampaian materi-materi pendidikan, pelatihan, sosialisasi, komunikasi dan advokasi tentang pembinaan ideologi Pancasila di kalangan Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah;</p> <p>2. Untuk menyamakan visi, persepsi gerak,</p>	<p>Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025</p> <p>3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2025</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</p> <p>5. Peraturan BPIP No. 1 Tahun 2019 tentang Struktur</p>	<p>Pembinaan Ideologi Pancasila</p> <p>Ruang Lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Materi; 2. Penyusunan Bahan Ajar; 3. Penyusunan Standar Materi; 4. Pelaksanaan Pendidikan Formal, Informal, Nonformal; 5. Pelaksanaan Pelatihan; 6. Sosialisasi; 7. Advokasi; 8. Komunikasi; 	<p>Legislatif</p> <p>Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Politik, Kelompok Masyarakat Lainnya, Para Pegajar, Para Pendidik, Para Pelatih, Siswa dan Mahasiswa, Peserta didik, Mitra dunia pendidikan</p>	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			<p>pola dan jenis materi pengajaran dan pelatihan yang dilaksanakan oleh setiap <i>stakeholder</i> pendidikan dalam dunia pendidikan formal, nonformal dan informal;</p> <p>3. Sebagai panduan utama dalam penyusunan silabus, bahan ajar dan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, sejarah dan ke-</p>	<p>Organisasi dan Tata Kerja BPIP</p> <p>6. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Organisasi BPIP</p>			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			Pancasila-an bagi setiap Penyelenggara Dunia Pendidikan, Organisasi sosial politik, Ormas dan Komponen Masyarakat Lainnya.				
6.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Deputi Pengkajian dan Materi	1. Sebagai upaya menjawab kebutuhan akan rancangan secara rinci mengenai pelaksanaan pembinaan ideologi pancasila yang diwujudkan	1. Undang-Undang Dasar NRI 1945 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun	Materi Pokok : 1. Arah Kebijakan Pembinaan Idiologi Pancasila; 2. Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila; Ruang Lingkup :	Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, TNI dan POLRI, ASN dan Pejabat Negara, Dunia	Oktober 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			<p>dalam tahapan yang berhubungan secara kausalitas dalam rangka mewujudkan tujuan Pancasila oleh semua Warga Negara Indonesia;</p> <p>2. Sebagai regulasi yang mengatur arahan (<i>direction</i>) bagi Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan yang bersifat</p>	<p>2020 tentang RPJMN 2020 – 2025</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</p> <p>5. Peraturan BPIP No. 1 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPIP</p> <p>6. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi</p>	<p>1. Pancasila sebagai Ideologi;</p> <p>2. Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa;</p> <p>3. Lima Nilai Dasar Pancasila;</p> <p>4. Arah dan Tujuan Pembangunan Pancasila;</p> <p>5. Demokrasi Pancasila;</p> <p>6. Ekonomi Pancasila;</p> <p>Objek Pengaturan :</p> <p>1. Arah Dasar;</p> <p>2. Peta Jalan;</p> <p>3. Rencana Aksi;</p> <p>4. <i>Timeline</i>;</p>	<p>Pendidikan, Pelaku Ekonomi, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan;</p>	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			strategis untuk mewujudkan tujuan Pancasila melalui pembinaan ideologi Pancasila; 3. Membantu Kementrian/Lembaga dalam setiap alur-pengembangan yang menuntun pelaku untuk mencapai tujuan Pancasila melalui strategi implementasi yang di- <i>breakdown</i> dalam	Organisasi BPIP	5. Pola Koordinasi; 6. Kewajiban dan Kewenangan masing-masing Kementrian/Lembaga, Pemda, Organisasi kemasyarakatan		

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			tahap, waktu subyek penanggungjawabnya.				
7.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Materi Pokok Bahan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila	Deputi Pengkajian dan Materi	1. Guna menjawab kelangkaan materi sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila pada para penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah, penyelenggara pendidikan dan dalam rangka menyatukan persepsi dan	1. Undang-Undang Dasar NRI 1945 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2025 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018	Materi Pokok: 1. Materi Pokok Bahan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Ruang Lingkup: 2. Penyusunan Materi Sosialisasi; 3. Penyusunan Bahan Sosialisasi; 4. Penyusunan Standar Materi Sosialisasi;	Kementerian dan Lembaga Non Kementerian, TNI dan POLRI, ASN dan Pejabat Negara, Dunia Pendidikan, Pelaku Ekonomi, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyara-	November 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			bahan dasar penyusunan serta penyampaian materi-materi sosialisasi dalam dunia pendidikan, pelatihan, sosialisasi, komunikasi dan advokasi tentang pembinaan ideologi Pancasila di kalangan Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah.	tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 5. Peraturan BPIP No. 1 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPIP 6. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Organisasi BPIP	5. Pelaksanaan Sosialisasi dalam Pendidikan Formal, Informal, Nonformal; 6. Pelaksanaan Pelatihan; 7. Sosialisasi; 8. Advokasi; 9. Komunikasi; Obyek Pengaturan: 1. Kementerian Lembaga; 2. Pemerintah Daerah; 3. Penyelenggara Dunia Pendidikan; 4. Organisasi Sosial	katan	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
					Politik; 5. Organisasi Masyarakat; 6. Komponen Masyarakat Lainnya.		
8.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Purna Paskibraka Indonesia	Deputi Pendidikan dan Pelatihan	Dalam rangka mendukung peran Purna Paskibraka Indonesia sebagai Duta Pancasila yang akan berperan dalam membumikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh komponen bangsa dan masyarakat, perlu dilaksanakan	1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP 2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP 3. Peraturan Presiden tentang Pembinaan	Substansi peraturan ini adalah pengaturan mengenai pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi Purna Paskibraka Indonesia secara berkelanjutan dan berjenjang	1. Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga 3. Kementerian /lembaga/ pemerintah daerah	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			pendidikan dan pelatihan kepada Purna Paskibraka Indonesia Duta Pancasila secara berkelanjutan dan berjenjang	Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka		4. Kedeputian di lingkungan BPIP	
9.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan yang harus dimulai sejak dini; 2. Salah satu program pembinaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP 2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP 3. Peraturan Presiden tentang Pembinaan 	Substansi peraturan ini adalah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 2. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 3. Kementerian Pemuda dan Olahraga 	Februari 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	Pusaka		<p>ideologi Pancasila yang masuk dalam kategori sejak dini adalah pembinaan ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;</p> <p>3. Dalam rangka melakukan pengendalian program pembinaan ideologi Pancasila tersebut, BPIP harus memiliki</p>	<p>Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka</p>		<p>4. Kementerian /lembaga/ pemerintah daerah</p> <p>5. Kedeputian di lingkungan BPIP</p>	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			instrumen hukum sebagai pedoman yang berisi mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria				
10.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Tata Cara Penetapan dan Peran Purna Paskibraka Indonesia Duta Pancasila	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan yang dapat dilaksanakan melalui berbagai upaya terstruktur dan sistematis;2. Salah satu upaya	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP3. Peraturan Presiden tentang Pembinaan Ideologi Pancasila	Substansi peraturan ini adalah Tata Cara Penetapan dan Peran Purna Paskibraka Indonesia Duta Pancasila	<ol style="list-style-type: none">1. Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka2. Kementerian Pemuda dan Olahraga3. Kementerian /lembaga/ pemerintah daerah4. Kedeputian	Februari 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			dapat dilakukan melalui Purna Paskibraka Indonesia yang jumlahnya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia yang akan menjadi duta-duta Pancasila dalam rangka membumikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh komponen bangsa dan masyarakat;	kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka		di lingkungan BPIP	
11.	Rancangan	Deputi Bidang	1. Pancasila sebagai	1. Peraturan	Substansi yang	1. Seluruh	Maret 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	Peraturan BPIP tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pengendalian dan Evaluasi	ideologi dan dasar negara harus ditegakkan dan diamankan dalam berbagai sendi kehidupan melalui program dan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila perlu dilaksanakan	Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya 3. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP 4. Peraturan	diatur: 1. Pedoman kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam bentuk analisis atau penilaian terhadap implementasi atau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan; 2. Instrumen untuk mendapatkan data atau informasi sebagai	pegawai BPIP	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			pengukuran terhadap pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, praktik penyelenggaraan negara serta penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara terencana, sistematis dan terpadu	Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum BPIP.	bahan masukan dalam perumusan kebijakan guna meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan yang akan dilaksanakan sehingga efektif, efisien dan tepat sasaran; 3. Monitoring pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan.		
12.	Rancangan	Biro Fasilitasi	Dalam rangka	1. Undang-Undang	Peraturan Kepala ini	Pejabat	Mei 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	Peraturan BPIP tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian	optimalisasi penyelenggaraan keprotokolan dan untuk kelancaran pelaksanaan acara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu dibuat Pedoman Keprotokolan	1. Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972	dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan/atau petugas keprotokolan dalam penyelenggaraan kegiatan Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	dan/atau petugas keprotokolan dalam penyelenggaraan kegiatan Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Badan Pembinaan	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila			
13.	Rancangan Peraturan BPIP	Sekretariat Utama, Biro	1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi	1. Peraturan Pemerintah	Substansi yang diatur:	Seluruh Pegawai di	Maret 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan BPIP	Perencanaan dan Keuangan	<p>negara harus ditegakkan dan diamankan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui program pembinaan ideologi Pancasila yang disusun secara terencana dan terpadu oleh BPIP;</p> <p>2. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam</p>	<p>Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP</p> <p>4. Peraturan Menteri</p>	<p>1. Ruang lingkup;</p> <p>2. Pengumpulan data kinerja;</p> <p>3. Pengukuran data kinerja;</p> <p>4. Pelaporan kinerja;</p> <p>5. Penggunaan data kinerja;</p> <p>6. Monitoring dan evaluasi;</p> <p>7. SOP;</p> <p>8. Format laporan data kinerja;</p> <p>9. Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah; dan</p> <p>10. Format laporan</p>	lingkungan BPIP	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			pelaksanaan program pembinaan ideologi Pancasila dan mendorong reformasi birokrasi dibangun sistem akuntabilitas kinerja BPIP; 3. Guna meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu menyusun	Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lem baga Tahun 2020-2024 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	monitoring kinerja.		

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			pedoman pengelolaan kinerja di lingkungan BPIP.	Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP			
14.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Susunan	Sekretariat Utama, Biro Hukum dan	Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11	1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018	Substansi peraturan ini adalah pengaturan	1. Purna Pasukan Pengibar	Februari 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	Organisasi, Tata Kerja, Tugas, dan Fungsi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia	Organisasi	ayat (2) Peraturan Presiden tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	tentang BPIP 2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP 3. Peraturan Presiden tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	mengenai susunan organisasi, tata kerja, tugas, dan fungsi Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia	Bendera Pusaka 2. Kedeputian di lingkungan BPIP	
15.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Organisasi dan	Sekretariat Utama, Biro Hukum dan Organisasi	1. BPIP perlu membentuk struktur organisasi dan	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP	Substansi peraturan ini adalah pengaturan mengenai tugas,	Seluruh Pegawai BPIP	September 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	Tata Kerja BPIP		<p>tata kerja yang ideal dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila secara efektif;</p> <p>2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan BPIP;</p> <p>3. Terdapat tugas dan fungsi dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang belum</p>		fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BPIP guna menyempurnakan Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP		

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			terakomodasi dalam Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018; 4. Terdapat penyetaraan JFT yang telah disetujui KemenpanRB.				
16.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Pembentukan Produk Hukum Lainnya di Lingkungan BPIP	Sekretariat Utama, Biro Hukum dan Organisasi	1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pembinaan Ideologi Pancasila secara terencana, terarah, dan terpadu, dibutuhkan pembentukan	1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP 2. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP	Cara, metode, teknik dan standar pembentukan Surat Edaran, Instruksi, Nota Kesepahaman, dan Perjanjian Kerja Sama	Seluruh Pegawai BPIP	Desember 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			produk hukum lain (Surat Edaran, Instruksi, Nota Kesepahaman, dan Perjanjian Kerja Sama) di lingkungan BPIP; 2. BPIP belum memiliki peraturan yang mengatur tentang cara, metode, teknik dan standar pembentukan produk hukum lain.				
17.	Rancangan	Sekretariat	1. Dalam rangka	1. Undang-Undang	Substansi yang	Seluruh	April 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	Peraturan BPIP tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPIP	Utama, Biro Pengawasan Internal	mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tata kelola pemerintahan yang baik, perlu pengendalian penerimaan Gratifikasi di lingkungan BPIP melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan	1. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	diatur: 1. Tujuan dan ruang lingkup 2. Gratifikasi 3. UPG BPIP 4. Implementasi 5. Proses pelaporan dan tindak lanjut 6. Hak dan perlindungan pelapor	pegawai BPIP	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			<p>Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, PNS dan penyelenggara negara wajib melaporkan Gratifikasi yang diterimanya</p>	<p>tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</p>			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			kepada KPK; 3. Belum terdapat aturan mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan BPIP.	5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP 6. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP 3. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi			
18.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Manajemen Risiko di	Sekretariat Utama, Biro Pengawasan Internal	1. Dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara	1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan	Substansi yang diatur: 1. Tujuan, Manfaat dan Prinsip Manajemen	Seluruh Pegawai BPIP	Bulan Juni 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		<p>efektif dan efisien; dan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja diperlukan penerapan manajemen risiko di lingkungan BPIP;</p> <p>2. Belum terdapat aturan mengenai manajemen risiko di lingkungan BPIP.</p>	<p>Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</p> <p>4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan</p>	<p>Risiko;</p> <p>2. Penerapan Manajemen Risiko, terdiri atas:</p> <p>3. Wujud Penerapan Risiko;</p> <p>4. Budaya Sadar Risiko;</p> <p>5. Struktur</p> <p>6. Manajemen Risiko;</p> <p>7. Proses Manajemen Risiko.</p>		

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				Pembinaan Ideologi Pancasila 5. Keputusan Kepala BPIP Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Dilingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila			
19.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Layanan Informasi Publik BPIP	Sekretariat Utama, Pusat Data dan Informasi	1. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun	Substansi yang diatur: 1. Asas dan tujuan; 2. Hak dan kewajiban pengguna dan penyedia	Masyarakat Indonesia	Juli 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			<p>satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;</p> <p>2. BPIP merupakan badan publik yang menyelenggarakan fungsi melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun</p>	<p>2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP</p>	<p>informasi publik;</p> <p>3. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;</p> <p>4. Informasi yang dikecualikan; dan</p> <p>5. Struktur, wewenang, dan tugas PPID.</p>		

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			<p>secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia;</p> <p>3. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan akuntabel serta optimalisasi pengawasan</p>				

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			publik, BPIP perlu mengakomodasi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
20.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Layanan Publik BPIP	Sekretariat Utama, Pusat Data dan Informasi	Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, khususnya Pasal 22	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang	Substansi yang diatur: 1. Standar pelayanan publik; dan 2. Organisasi pelayanan publik BPIP.	Seluruh unit kerja di lingkungan BPIP	Juli 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 4. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan			
21.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Pengadaan PNS, PPPK, dan Pindah Instansi	Sekretariat Utama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan/Kebijakan tentang Pengadaan PNS, P3K, dan	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah	1. Tahapan Pengadaan kebutuhan; dan 2. Penilaian terhadap kebutuhan.	Seluruh unit kerja di lingkungan BPIP	Juni 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			Pindah Instansi	dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				Cara Pelaksanaan Mutasi			
22.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Pemberian Penghargaan	Sekretariat Utama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah maka perlu	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang Melakukannya secara Luar	1. Sasaran pemberian penghargaan; 2. Kriteria pemberian penghargaan; 3. Persyaratan pemilihan; dan 4. Penilaian.	Seluruh unit kerja di lingkungan BPIP	Juni 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			diberikan Penghargaan.	Biasa 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil			
23.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Manajemen Karier PNS di Lingkungan BPIP	Sekretariat Utama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Bahwa untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi PNS maka perlu ditetapkan Peraturan/Kebijakan tentang Manajemen	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan	1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan; 2. Pengadaan; Pangkat dan Jabatan; 3. Pengembangan karier; 4. Mutasi; 5. Penilaian kinerja;	Seluruh unit kerja di lingkungan BPIP	Juni 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			Karier PNS di Lingkungan BPIP	Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	6. Penggajian dan tunjangan; 7. Penghargaan; 8. Disiplin; 9. Pemberhentian; 10. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan Perlindungan.		
24.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Pola Karir Pegawai di Lingkungan BPIP	Sekretariat Utama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 134 ayat (2) huruf d PP Nomor 11 Tahun 2017,	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun	1. Talenta untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 2. Talenta untuk Jabatan Administrator; dan	Seluruh unit kerja di lingkungan BPIP	Juni 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			maka perlu ditetapkan Peraturan/Kebijakan tentang Manajemen Talenta Pegawai di Lingkungan BPIP	2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur	3. Talenta untuk Jabatan Pengawas.		

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				Sipil Negara.			
25.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Hasil Penilaian Kinerja	Sekretariat Utama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Bahwa agar pembayaran belanja pegawai yang berupa tunjangan kinerja pegawai dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur tentang Peraturan/Kebijakan tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan pembayaran tunjangan kinerja: dan 2. Besaran tunjangan kinerja. 	Seluruh unit kerja di lingkungan BPIP	Juni 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
26.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	Sekretariat Utama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Bahwa untuk lebih memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian JPT dan Jabatan Administrasi secara terbuka dan kompetitif, maka perlu diatur tentang Peraturan/Kebijakan tentang pengisian JPT dan Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) serta promosi	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah No.	1. Persyaratan pengisian dan pengangkatan JPT dan Jabatan Administrasi; dan 2. Tahapan pengisian dan pengangkatan JPT dan Jabatan Administrasi.	Seluruh unit kerja di lingkungan BPIP	Juni 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				100 Tahun 2000 tentang Pangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				Lingkungan Pemerintah 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002			
27.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Mutasi Internal Pegawai di Lingkungan BPIP	Sekretariat Utama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Bahwa untuk lebih meningkatkan obyektifitas, transparansi, perencanaan karier, dan motivasi kerja PNS di lingkungan BPIP, perlu adanya mutasi jabatan di lingkungan BPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan JPT; dan 2. Mutasi Proses dan mekanisme mutasi JPT. 	Seluruh unit kerja di lingkungan BPIP	Juni 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				<p>Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil</p> <p>4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5</p>			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi			
28.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Perlindungan Untuk Pegawai BPIP di Luar Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Program Pensiun yang Diselenggarakan Secara Nasional)	Sekretariat Utama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Bahwa untuk memberikan perlindungan menjamin kesejahteraan pegawai, maka diatur Peraturan/Kebijakan tentang Perlindungan untuk Pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan program pensiun,	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang	1. Prosedur pemberian bantuan hukum; dan 2. Prosedur pemberian jaminan kematian.	Seluruh Pegawai di Lingkungan BPIP	Juni 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
			yang diselenggarakan secara nasional)	Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			
29.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Sekretariat Utama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Bahwa untuk menyesuaikan isi dalam Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2019 dengan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah	Penyesuaian jam masuk dan jam pulang kantor bagi pegawai di lingkungan BPIP.	Seluruh Pegawai di Lingkungan BPIP	Juni 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	<p>Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Cuti Pegawai</p>		<p>2017, perlu diatur mengenai Perubahan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Cuti Pegawai</p>	<p>Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>			

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Cuti Pegawai 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil			
30.	Rancangan Peraturan BPIP	Sekretariat Utama, Biro	Bahwa untuk menyesuaikan hasil	1. Peraturan Presiden Nomor 7	Penambahan kelas jabatan bagi jabatan	Seluruh Pegawai di	Juni 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
	tentang Perubahan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPIP	Umum dan Sumber Daya Manusia	kegiatan penyusunan Anjab, ABK, Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan, perlu menetapkan Perubahan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPIP	Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di	yang belum tercantum dalam Peraturan BPIP dimaksud.	Lingkungan BPIP	

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				Lingkungan BPIP			
31.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Potongan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPIP	Sekretariat Utama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Bahwa untuk menyesuaikan besaran potongan tunjangan kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan cuti, maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Potongan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 3. Peraturan Badan Pembinaan 	Penyesuaian besaran potongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang Melaksanakan cuti.	Seluruh Pegawai di Lingkungan BPIP	Juni 2021

No.	Judul	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan	Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup dan Obyek Pengaturan	Sasaran	Target Waktu Penyelesaian
				Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2019 Pemberian dan Potongan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPIP			

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2021

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Utama	
2.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	

41